

**INTERAKSI SOSIAL DALAM TATA KELOLA
KOLABORATIF DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA DENGAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT**
(Studi Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital di Kota Malang)

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD DEVAS SYAIKHUL KHUFAT

NPM 22201091002

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, “Interaksi Sosial Dalam Tata Kelola Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Komunitas Informasi Masyarakat (Studi Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital di Kota Malang)” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 14 April 2026
Yang membuat pernyataan



Muhammad Devas Syaikhul Khufat
NPM 22201091002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**INTERAKSI SOSIAL DALAM TATA KELOLA
KOLABORATIF DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA DENGAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
(Studi Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital di Kota Malang)**

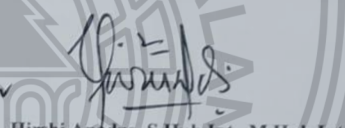
Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 14 April 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si
NPP. 21515061976321004
Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int
NPP. 161101198932138

Mengetahui,

Ketika Program Studi Administrasi Publik



Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., MAP
NPP. 191605199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**INTERAKSI SOSIAL DALAM TATA KELOLA KOLABORATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
(Studi Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital di Kota Malang)**

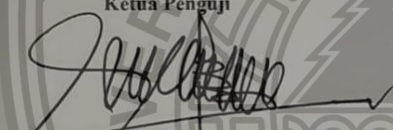
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

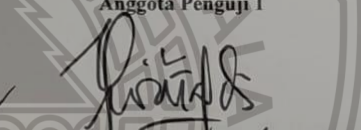
Malang, 20 Mei 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji


Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si
NPP. 21515061976321004

Anggota Penguji 1


Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M. Hub.Int
NPP. 161101198932138

Anggota Penguji 2


Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP
NPP. 191605199232105

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi


Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si
NPP. 21515061976321004

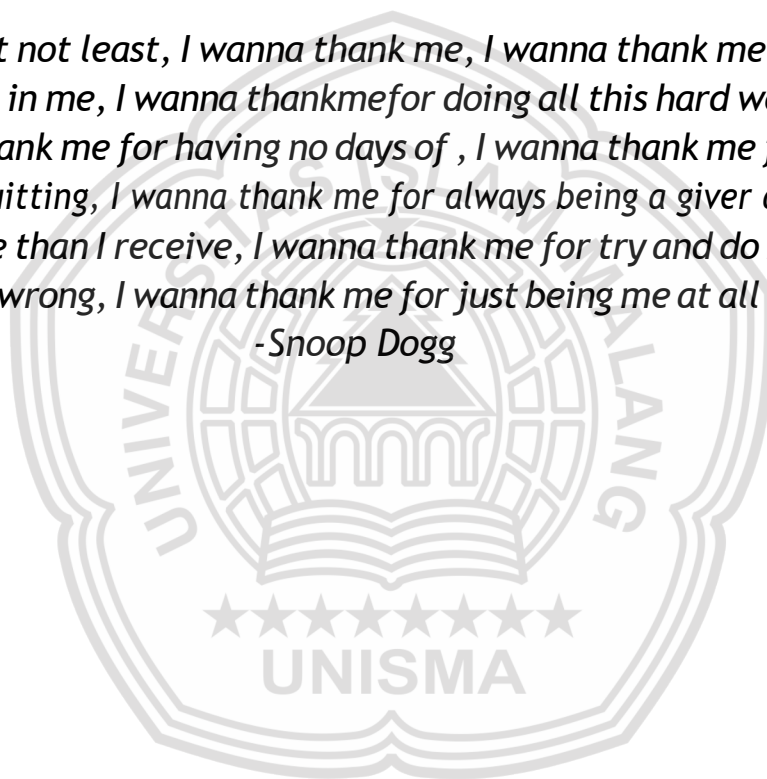
iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

KEDUA ORANG TUA TERCINTA,
AYAH AHMAT SURUL & IBU KUSRINI.
SEGALA PENGORBANAN, DO'A TIADA
HENTI DAN SEGALANYA UNTUK
ANAK TUNGGAL KALIAN INI.

*Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for
believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I
wanna thank me for having no days of , I wanna thank me for...
for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try
give more than I receive, I wanna thank me for try and do more
right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

-Snoop Dogg

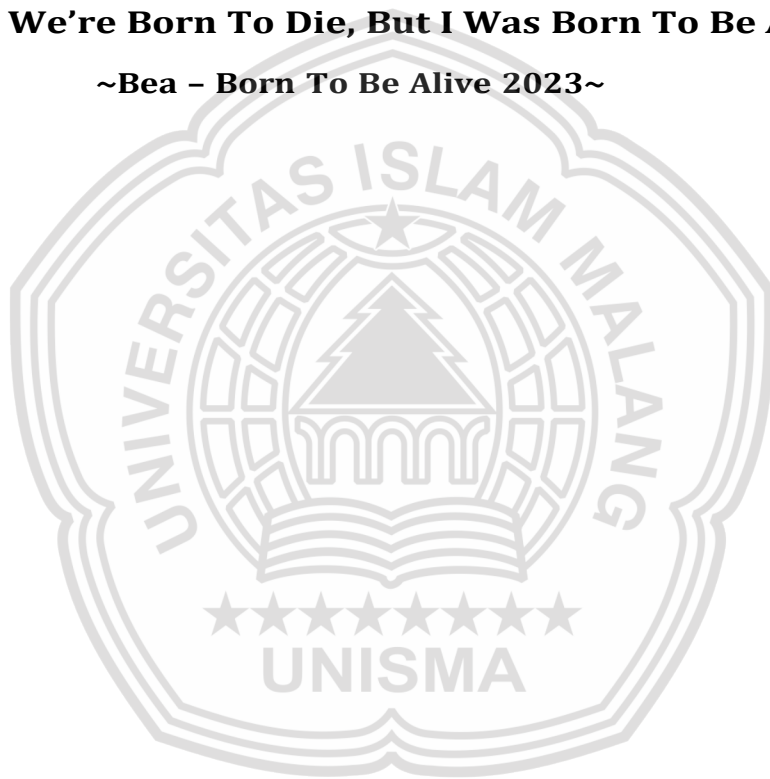


MOTTO

“Dalam perjalanan hidup ini, janganlah takut ditinggalkan fi meninggalkan karena sejatinya semua sudah diukir dan kita harus tetap berjalan serta mengupayakan segala hal yang terbaik” ~ Devas 2021

They Say We're Born To Die, But I Was Born To Be Alive.

~Bea - Born To Be Alive 2023~



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Interaksi Sosial Dalam Tata Kelola Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Komunitas Informasi Masyarakat (Studi Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital di Kota Malang)”.

Skripsi tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab akademik, tetapi juga perjalanan panjang penuh pelajaran, ketekunan, dan makna. Skripsi ini merupakan syarat kelulusan untuk menyandang gelar sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Selain itu skripsi ini merupakan persembahan sebagai bukti semangat usaha penulis dalam memperjuangkan sebuah gelar sarjana. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Bapak Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan serta ilmu sepanjang perkuliahan.
3. Bapak Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int selaku Wakil Dekan 2 sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan dari awal bertemu saat mengajukan keterangan biaya pendidikan untuk pengajuan beasiswa unggulan hingga penulis dinyatakan lulus.
4. Bapak Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi sekaligus dosen penguji yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Bapak Dr. Didik Supriyanto, S.T., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan nasihat dalam penulis menjalankan perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staff Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan arahan selama mengurus dokumen akademik.

7. Seluruh keluarga yang senantiasa mendo'akan, memberikan arahan hidup, perhatian dan semangat bagi penulis.
8. Seseorang yang penulis temui pada 18 Desember 2022 yang telah sangat menemani sepanjang masa perkuliahan hingga saat ini.
9. Teman seperjuangan yang penulis anggap saudara sendiri untuk kalian semua, HAI SEMANGAT YA! See u on top ya RWUEK!!!!
10. Seluruh informan dan segala pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga sumbangsih kecil yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan mereka yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya, dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan yang bersifat membangun dan berguna untuk pembenahan dan penyempurnaan serta memotivasi penulis.

Malang, 14 April 2026

Muhammad Devas Syaikhul Khufat

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Devas Syaikhul Khufat, Lahir pada 26 November 2002 di Gresik. Merupakan anak tunggal dari pasangan Ahmat Surul dan Kusriani. Lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kemandirian. Sejak kecil, penulis telah dibentuk untuk memiliki semangat belajar yang tinggi serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan.

Pendidikan formal penulis dimulai di TK Muslimat NU 134 Hidayatul Ummah Balongpanggang, Gresik. Kemudian dilanjutkan di MI Hidayatul Ummah Balongpanggang, Gresik. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dan melanjutkan ke SMA Negeri Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengembangkan kapasitas diri baik secara akademik maupun non-akademik. Salah satu pencapaian terbesar yang diraih adalah keberhasilan lolos dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Angkatan 7. Prestasi ini menjadi semakin signifikan karena penulis merupakan satu-satunya mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik yang berhasil lolos dalam program tersebut, sehingga mencerminkan kompetensi dan daya saing yang dimiliki.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari proses akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Publik. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang administrasi publik. Penulis berharap hasil penelitian ini tidak hanya menjadi syarat akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis dan pengembangan keilmuan di masa mendatang.

RINGKASAN

Muhammad Devas Syaikhul Khufat, 2026, **Interaksi Sosial Dalam Tata Kelola Kolaboratif Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Komunitas Informasi Masyarakat (Studi Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital di Kota Malang)**. Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si dan Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. Jumlah kata (BAB 1 – BAB 6) 23985, Jumlah halaman arab 129, jumlah halaman romawi 17.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan literasi digital di masyarakat serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam meningkatkan kapasitas digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai strategi memperluas jangkauan literasi digital berbasis komunitas. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana interaksi antara kedua aktor tersebut dalam mendukung peningkatan literasi digital masyarakat. Interaksi menjadi krusial karena tidak hanya merefleksikan hubungan kelembagaan, tetapi juga menentukan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis secara mendalam dinamika interaksi antara Diskominfo dan KIM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam program literasi digital. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola interaksi, bentuk komunikasi, intensitas hubungan, serta dinamika partisipasi dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik serta mengungkap kesenjangan antara konsep teoritis dan praktik empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara Diskominfo dan KIM berlangsung secara dinamis, fleksibel, dan berbasis kebutuhan, namun cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Pola komunikasi yang terbentuk bersifat dua arah dan didukung oleh media digital, sehingga meningkatkan responsivitas dan efisiensi koordinasi, meskipun belum sepenuhnya menjamin konsistensi dan kesetaraan dalam pertukaran informasi. Intensitas interaksi yang fluktuatif menunjukkan bahwa hubungan antaraktor masih bergantung pada momentum kegiatan, sementara keberagaman bentuk interaksi seperti koordinasi, komunikasi langsung, dan pendampingan masyarakat memperkuat proses literasi digital secara kontekstual. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa interaksi sosial yang adaptif dan partisipatif menjadi faktor kunci dalam peningkatan literasi digital, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek konsistensi, struktur, dan keberlanjutan.

Kata Kunci: *interaksi sosial; literasi digital; Diskominfo; Komunitas Informasi Masyarakat; komunikasi; partisipasi; masyarakat digital*

SUMMARY

Muhammad Devas Syaikhul Khufat, 2026, **Social Interaction in Collaborative Governance between the Department of Communication and Informatics and Community Information Groups (A Study on Efforts to Improve Digital Literacy in Malang City)**. Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si and Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. Word Count (CHAPTER 1 - Final CHAPTER) 23985, Number of Arabic pages 129, Number of Roman pages 17.

This study is motivated by the persistent gap in digital literacy within society and the importance of collaboration between government and community actors in enhancing digital capacity. The Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of Malang City with the Community Information Group (KIM) as a strategy to expand community-based digital literacy outreach. The research problem focuses on how the interaction between these two actors contributes to improving digital literacy among the public. Interaction is considered crucial as it not only reflects institutional relationships but also determines the quality, effectiveness, and sustainability of information dissemination to society.

This study employs a qualitative approach with a descriptive research design to analyze in depth the dynamics of interaction between Diskominfo and KIM. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving informants directly engaged in digital literacy programs. The collected data are analyzed systematically to identify patterns of interaction, forms of communication, intensity of relationships, and participation dynamics in program implementation. This approach enables the researcher to understand the phenomenon holistically and to reveal the gap between theoretical concepts and empirical practices in the field.

The findings indicate that the interaction between Diskominfo and KIM is dynamic, flexible, and needs-based; however, it tends to be reactive and not yet fully institutionalized. The communication pattern is two-way and supported by digital media, enhancing responsiveness and coordination efficiency, although it does not fully ensure consistency and equality in information exchange. The fluctuating intensity of interaction suggests that relationships among actors are still dependent on program momentum, while the diversity of interaction forms—such as coordination, direct communication, and community assistance—strengthens the digital literacy process contextually. Overall, this study concludes that adaptive and participatory social interaction is a key factor in improving digital literacy, although challenges remain in terms of consistency, structural integration, and sustainability.

Keywords: *social interaction; digital literacy; Diskominfo; Community Information Group; communication; participation; digital society*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk secara efektif mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keterampilan navigasi internet, evaluasi konten digital, serta partisipasi yang aman dan etis di ruang maya (Gilster, 1997). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster pada 1997, yang mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format digital, bukan hanya keterampilan teknis semata (Gilster, 1997).

Di era transformasi digital saat ini, literasi digital tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi partisipasi sosial, ekonomi, dan politik yang inklusif. Ketidakmampuan dalam literasi digital dapat memperlebar kesenjangan digital, di mana kelompok tertentu seperti lansia atau masyarakat pedesaan terpinggirkan dari akses informasi dan peluang ekonomi. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menekankan bahwa literasi digital adalah hak asasi manusia, di mana pendidikan tentangnya harus mencakup aspek kritis seperti keamanan online dan etika digital (UNESCO, 2021).

Di Indonesia, literasi digital menjadi isu strategis seiring dengan ledakan penggunaan internet yang mencapai 215 juta pengguna pada 2023, namun indeks literasi digital nasional masih rendah (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia APJII, 2023). Kota Malang, sebagai kota pendidikan dan perdagangan di Jawa Timur, menghadapi tantangan unik di mana populasi mahasiswa dan pedagang di Kota Malang sangat bergantung pada teknologi untuk belajar dan bisnis. Namun, survei menunjukkan bahwa banyak warga masih rentan terhadap risiko seperti penyebaran *hoaks* dan penipuan online, yang dapat menghambat inovasi lokal. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, keterbatasan jangkauan pemerintah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktor lain yang memiliki kedekatan dengan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks implementasi di Kota Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berinteraksi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam berbagai kegiatan literasi digital, seperti sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Interaksi tersebut tidak hanya berlangsung dalam bentuk hubungan administratif, tetapi juga terjadi dalam proses kerja sama yang melibatkan berbagai aktor dalam penyelenggaraan program. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, keterlibatan pemerintah dan komunitas menunjukkan adanya ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan pertukaran informasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara Diskominfo dan KIM tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan proses interaksi sosial yang berkembang dalam praktik kolaborasi. Sebagaimana

yang disampaikan oleh Bapak Iswahyudi, S.T selaku ketua KIM Parsehjaya Kelurahan Bumiayu:

“KIM disini hadir dalam bentuk sederhana yang gampang menjangkau masyarakat, kami selalu berinteraksi dengan Diskominfo mengenai berbagai hal dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat” (Wawancara, 10 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya keterlibatan komunitas dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat. Interaksi yang terjadi mencerminkan hubungan antara pemerintah dan komunitas dalam menjalankan fungsi komunikasi publik. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, kondisi ini menunjukkan adanya keterhubungan peran antar aktor dalam mendukung pelaksanaan program literasi digital.

Berdasarkan kondisi awal di lapangan, interaksi antara Diskominfo dan KIM tidak selalu berlangsung dalam satu pola yang seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan komunitas tidak hanya dibentuk oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh dinamika interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, interaksi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana proses kerja sama antar aktor berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dinamika interaksi sosial dalam kerangka tata kelola kolaboratif tersebut dalam mendukung literasi digital masyarakat.

KIM secara resmi mulai dikembangkan pada 2016 oleh pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010. Regulasi ini menempatkan KIM sebagai lembaga komunikasi sosial berbasis masyarakat yang dibentuk secara mandiri

untuk mengelola, menyebarluaskan, dan memanfaatkan informasi publik sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, KIM diposisikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berfungsi menjembatani arus informasi antara pemerintah dan warga, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Fokus utama kebijakan tersebut masih bertumpu pada penguatan komunikasi sosial dan penyebaran informasi pembangunan melalui pendekatan kelompok masyarakat (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2010).

Dalam implementasinya di daerah, pembentukan KIM mulai berkembang secara lebih konkret tahun 2016 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan informasi publik hingga ke tingkat masyarakat. Pada fase ini, KIM berperan sebagai kelompok komunikasi yang membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Keberadaan KIM pada periode tersebut masih cenderung dipahami sebagai kelompok yang berorientasi pada penyebaran informasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bertumpu pada pola komunikasi yang relatif formal dan berbasis kelembagaan.

Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kompleksitas urusan komunikasi dan informatika di era digital, pemerintah kemudian melakukan penyesuaian regulasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Regulasi ini mencabut peraturan tahun 2010 dan menempatkan pengelolaan komunikasi publik, termasuk KIM, dalam kerangka urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah

pusat dan daerah. Dalam konteks ini, terjadi perkembangan dalam pendekatan pengelolaan komunikasi publik yang mulai mengarah pada keterlibatan berbagai aktor secara lebih luas.

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2022 mulai terjadi pergeseran istilah dari Kelompok Informasi Masyarakat menjadi Komunitas Informasi Masyarakat. Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian pendekatan dari pola kelompok yang bersifat struktural menuju bentuk komunitas yang lebih terbuka dan partisipatif. Dalam konteks tersebut, Komunitas Informasi Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari aktor yang terlibat dalam proses komunikasi dan interaksi sosial di masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan adanya dinamika dalam praktik komunikasi publik yang semakin berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat di era digital.

Dalam konteks implementasinya di daerah, terjadi penyesuaian istilah dari Kelompok menjadi Komunitas sebagai refleksi perluasan peran dan pendekatan yang lebih inklusif. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa KIM tidak lagi dipahami semata sebagai kelompok komunikasi sosial, tetapi sebagai komunitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, berorientasi pada partisipasi publik, serta mendukung agenda literasi digital dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019; Antara News, 2023).

Data statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2021 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8%, dengan Kota Malang memiliki tingkat penggunaan sekitar 70% berdasarkan data

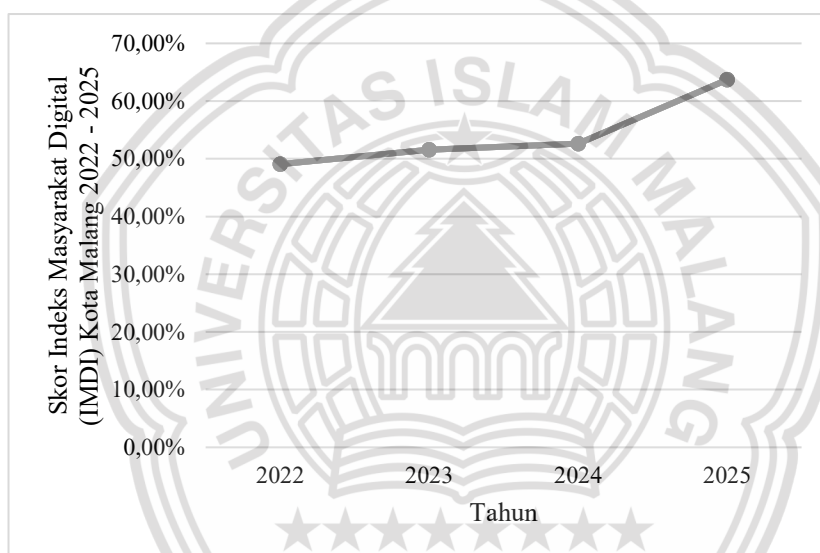
lokal (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII, 2023). Namun, indeks literasi digital nasional hanya 3,49 dari skala 5, menunjukkan bahwa meskipun akses meningkat, keterampilan seperti verifikasi informasi masih rendah. Tren ini diperkuat oleh laporan Kementerian Kominfo RI pada 2023, yang mencatat peningkatan penggunaan internet sebesar 15% per tahun di daerah perkotaan seperti Malang, didorong oleh kebutuhan layanan daring selama pandemi.

Di Kota Malang spesifik, Diskominfo melaporkan pada 2022 bahwa hanya 45% penduduk memiliki keterampilan dasar literasi digital, dengan kesenjangan terbesar di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan (Diskominfo Kota Malang, 2022). Ini mengindikasikan bahwa tanpa intervensi, risiko *cybercrime* yang naik 25% sejak 2021 dapat semakin parah (Kaspersky Lab, 2024). Hubungan interaksi Diskominfo dengan KIM di Kota Malang dimulai sejak 2022, dengan fokus pada program edukasi bersama seperti *workshop* literasi digital dan kampanye *anti-hoaks*.

Selain itu, peningkatan akses internet yang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di ruang digital, seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, rendahnya kesadaran keamanan digital, serta kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan tidak hanya terjadi pada aspek akses, tetapi juga pada aspek pemahaman dan keterampilan pengguna dalam mengelola informasi digital. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya yang tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari

proses pembelajaran sosial. Keterlibatan aktor non-pemerintah menjadi penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas serta menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial yang beragam. Oleh karena itu, keberadaan komunitas lokal seperti Komunitas Informasi Masyarakat menjadi relevan dalam mendukung proses penyebaran informasi dan peningkatan literasi digital di tingkat masyarakat.

Grafik 1.1. Skor Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kota Malang 2022 – 2025



Sumber: Pemerintah Kota Malang, 2025

Grafik diatas menunjukkan skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Malang mencapai 63,69, menandakan bahwa pemerintah kota telah berhasil mengembangkan ekosistem digital yang sangat baik. Peningkatan tersebut dipicu oleh sinergi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan dunia industri kreatif, yang secara bersama-menerus membangun infrastruktur, literasi, dan layanan digital publik.

Pemantauan Indeks Masyarakat Digital (IMDI) menggunakan survei terhadap 18 ribu responden dan 11 ribu pelaku usaha menjadi dasar evaluasi yang independen dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, sehingga hasilnya dapat dijadikan pijakan strategi digitalisasi daerah (Pemerintah Kota Malang, 2025). Dengan demikian, capaian ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknis, tetapi juga keberhasilan tata kelola kolaboratif yang memadukan teknologi, literasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam transformasi digital Kota Malang. Adapun skor IMDI Kota Malang menunjukkan peningkatan yang terbilang tinggi hingga 10,03 poin atau 19,05 persen dibanding capaian di tahun 2024. Secara terinci, skor capaian pada setiap pilarnya yakni 79,61 pada pilar Infrastruktur dan Ekosistem, 63,69 pada pilar Literasi, 57,73 pada pilar Pemberdayaan dan 46,55 pada pilar Pekerjaan Digital (Pemerintah Kota Malang, 2025).

Kota Malang sebagai kota pendidikan dan perdagangan di Jawa Timur memiliki tingkat penggunaan teknologi digital yang cukup tinggi, terutama di kalangan mahasiswa, pelaku usaha, dan masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pendidikan, komunikasi, dan ekonomi masyarakat semakin bergantung pada teknologi digital. Namun demikian, peningkatan penggunaan internet juga diikuti dengan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi digital. Berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC) tahun 2022, sebagian besar masyarakat Indonesia masih ragu terhadap kemampuan mereka dalam mengidentifikasi berita hoaks, dengan 45% responden merasa antara yakin dan

tidak yakin dalam membedakan informasi palsu di ruang digital. Selain itu, indeks keamanan digital masyarakat Indonesia juga masih tergolong rendah dengan skor 3,12 dari skala 5, yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan digital dan mengenali ancaman siber.

Program KIM ini telah mencapai lebih dari 5.000 peserta pada 2023, menurut laporan Diskominfo Kota Malang, dengan evaluasi menunjukkan peningkatan skor literasi digital peserta sebesar 20-30%. Tren terkini dari 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa interaksi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran etis tentang penggunaan digital, mengurangi insiden penyebaran informasi palsu di Malang. Hubungan *multi-stakeholder* seperti ini efektif di negara berkembang, karena melibatkan aktor lokal yang memahami konteks budaya dan sosial masyarakat (UNESCO, 2023).

Secara mendalam, fenomena interaksi ini relevan karena literasi digital di Kota Malang tidak hanya tentang akses teknologi, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Misalnya, pedagang di pasar tradisional Malang kini menggunakan *e-commerce*, namun tanpa literasi digital, mereka rentan terhadap penipuan online. Diskominfo, sebagai lembaga pemerintah, memiliki sumber daya resmi seperti anggaran dan jaringan, sementara KIM menyediakan pendekatan *bottom-up* melalui relawan yang lebih fleksibel. Interaksi tersebut menunjukkan adanya potensi dalam mendukung peningkatan inklusi digital, dengan survei internal Diskominfo pada 2024 menunjukkan bahwa 80% peserta program merasa lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi digital,

Di Kota Malang, peningkatan pengguna internet sebesar 15% per tahun, namun tanpa hubungan interaksi seperti ini, kesenjangan bisa memburuk (Badan Pusat Statistik BPS, 2024). Interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif antara Diskominfo dan Komunitas Informasi Masyarakat telah mengintegrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kegiatan komunitas, seperti festival budaya dan acara sekolah, sehingga lebih menarik dan efektif.

Implikasi dari dinamika interaksi antara aktor dalam konteks literasi digital di Kota Malang menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat perkembangan teknologi digital yang turut memengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi dan sosial. Literasi digital memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi seperti penggunaan platform digital dan promosi daring. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran serta variasi tingkat partisipasi antar komunitas. Data dari Diskominfo Kota Malang pada 2023 menunjukkan adanya perubahan dalam laporan hoaks di beberapa wilayah sasaran, yang menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan program literasi digital.

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara Diskominfo dan KIM menunjukkan adanya pembagian peran dalam proses tata kelola kolaboratif. KIM sebagai komunitas yang dibentuk melalui kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika hadir hingga tingkat kelurahan sebagai aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sementara itu, Diskominfo Kota Malang berperan sebagai fasilitator dan pembina yang mengoordinasikan pelaksanaan program literasi digital di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Diskominfo bertindak sebagai

pihak yang mendorong, memfasilitasi, serta menyediakan dukungan program, sedangkan KIM merespons melalui pelaksanaan kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi di lingkungan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif berlangsung melalui hubungan timbal balik antara aktor pemerintah dengan komunitas dalam mendukung peningkatan literasi digital masyarakat.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan keilmuan Administrasi Publik karena mengkaji hubungan antara pemerintah dan komunitas dalam pelaksanaan program publik melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015), *collaborative governance* merupakan bagian dari perkembangan administrasi publik modern yang menekankan keterlibatan multi-aktor dalam penyelesaian masalah publik secara kolektif. Dalam konteks ini, interaksi antara Diskominfo dan KIM menunjukkan praktik administrasi publik yang tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan berkembang melalui jaringan kerja sama, partisipasi masyarakat, dan komunikasi publik. Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan konsep *governance* yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya pada tema *collaborative governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, literasi digital di Kota Malang tidak hanya berkaitan dengan program pemerintah, tetapi juga melibatkan hubungan antara pemerintah dan komunitas dalam pelaksanaannya, tetapi juga melibatkan hubungan antara pemerintah dan komunitas dalam pelaksanaannya. Namun demikian,

bagaimana bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kerangka tata kelola kolaboratif antara Diskominfo dan KIM masih memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian yang secara spesifik mengkaji interaksi sosial antara pemerintah dan komunitas dalam konteks literasi digital di tingkat lokal masih terbatas, sehingga membuka ruang untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam.

Dengan demikian, penelitian mengenai Interaksi Sosial dalam Tata Kelola Kolaboratif Diskominfo dengan KIM dalam upaya peningkatan literasi digital di Kota Malang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika interaksi antar aktor dalam kerangka tata kelola kolaboratif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan yang lebih kontekstual di tingkat daerah. Situasi perkembangan digital yang terus berlangsung menuntut adanya pendekatan berbasis pemahaman empiris, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan ekosistem digital di Kota Malang yang terus meningkat belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan menggunakan teknologi secara aman.

Dalam konteks tersebut, upaya peningkatan literasi digital tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan komunitas sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif. Interaksi antara Diskominfo dengan KIM menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan program literasi digital

di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah bagaimana interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Komunitas Informasi Masyarakat dalam upaya peningkatan literasi digital di Kota Malang?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif antara Diskominfo dengan KIM dalam upaya peningkatan literasi digital masyarakat di Kota Malang.

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk interaksi sosial, mekanisme pelaksanaan kolaborasi, serta proses keterlibatan aktor dalam penyelenggaraan program literasi digital di tingkat masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi tersebut berlangsung dalam mendukung kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara aman dan produktif.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoretis

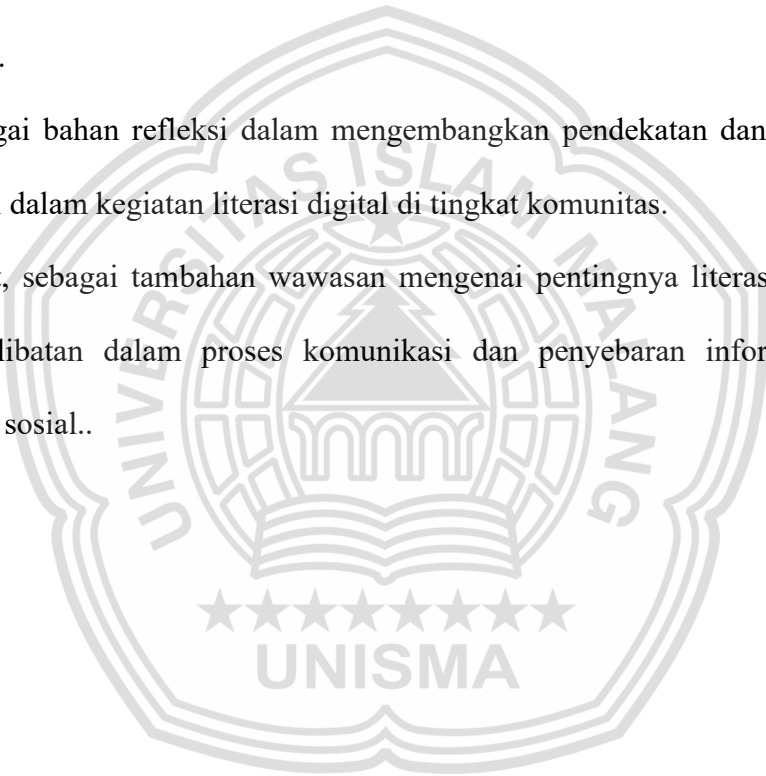
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya pada tema tata kelola kolaboratif, interaksi sosial, komunitas, dan literasi digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memperkaya literatur mengenai dinamika interaksi antara pemerintah dan komunitas dalam konteks peningkatan kapasitas masyarakat di era digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman

konseptual terkait peran interaksi sosial dalam mendukung praktik tata kelola kolaboratif.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Diskominfo Kota Malang, sebagai bahan masukan dalam pengembangan dan penguatan pelaksanaan program literasi digital berbasis kolaborasi dengan masyarakat.
2. KIM, sebagai bahan refleksi dalam mengembangkan pendekatan dan strategi komunikasi dalam kegiatan literasi digital di tingkat komunitas.
3. Masyarakat, sebagai tambahan wawasan mengenai pentingnya literasi digital serta keterlibatan dalam proses komunikasi dan penyebaran informasi di lingkungan sosial..



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai interaksi sosial dalam tata kelola kolaboratif antara Diskominfo dan KIM dalam upaya peningkatan literasi digital masyarakat, diketahui bahwa hubungan kolaboratif antara kedua aktor berlangsung melalui pola komunikasi yang dinamis, fleksibel, dan berbasis kebutuhan lapangan. Interaksi yang terjalin tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal birokrasi, tetapi juga berkembang melalui komunikasi informal, koordinasi situasional, serta pemanfaatan media digital dalam mendukung pelaksanaan program literasi digital. Kondisi tersebut terlihat dari penggunaan media komunikasi seperti WhatsApp, koordinasi langsung antar aktor, serta keterlibatan komunitas dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Dalam praktiknya, Diskominfo berperan sebagai fasilitator dan pembina program, sedangkan KIM menjadi aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lokal. Pola hubungan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif yang berlangsung lebih bersifat adaptif dibandingkan hierarkis.

Interaksi antara Diskominfo dan KIM berlangsung dalam pola dua arah yang memungkinkan adanya pertukaran informasi dan respons antar aktor secara lebih terbuka. Diskominfo tidak hanya memberikan arahan program, tetapi juga menerima masukan dan kondisi lapangan dari komunitas dalam pelaksanaan kegiatan literasi digital. Sementara itu, KIM tidak hanya menjalankan fungsi penyebaran informasi, tetapi juga berinisiatif menyesuaikan pendekatan

komunikasi dengan kondisi masyarakat di lingkungannya masing-masing. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak berjalan secara sepenuhnya top-down, melainkan berkembang melalui hubungan timbal balik antara pemerintah dan komunitas. Bentuk interaksi seperti ini memperlihatkan adanya keterlibatan komunitas dalam mendukung pelaksanaan program publik berbasis literasi digital di Kota Malang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan media digital menjadi bagian penting dalam mendukung proses komunikasi dan koordinasi antar aktor. Penggunaan media digital membantu mempercepat penyebaran informasi, mempermudah koordinasi kegiatan, serta meningkatkan responsivitas komunikasi antara Diskominfo dan KIM. Selain digunakan sebagai sarana koordinasi internal, media digital juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan edukasi literasi digital kepada masyarakat melalui sosialisasi, penyebaran informasi, dan pendampingan penggunaan media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menjadi objek literasi, tetapi juga menjadi sarana utama dalam membangun interaksi sosial antar aktor dalam tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi pola hubungan dan komunikasi antara pemerintah dengan komunitas di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan program literasi digital, keberadaan KIM sebagai komunitas lokal menunjukkan peran penting dalam menjangkau masyarakat secara lebih kontekstual. Pendekatan yang dilakukan komunitas dinilai lebih dekat dengan kondisi sosial masyarakat karena komunikasi berlangsung melalui lingkungan sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan

komunitas dalam kegiatan sosialisasi, edukasi penggunaan media digital, penyebaran informasi publik, hingga pendampingan masyarakat terkait literasi digital. Interaksi yang berlangsung secara langsung dan berbasis komunitas membantu masyarakat lebih mudah memahami informasi digital sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan kolaboratif antara Diskominfo dan KIM berkontribusi dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital secara lebih bijak dan partisipatif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif antara Diskominfo dan KIM masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Intensitas interaksi antar aktor cenderung fluktuatif dan sering bergantung pada momentum kegiatan atau program tertentu, sehingga hubungan kolaboratif belum berlangsung secara konsisten dalam setiap waktu. Selain itu, kapasitas dan tingkat partisipasi masing-masing komunitas juga berbeda-beda, yang memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan program literasi digital di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif yang berlangsung masih bersifat dinamis dan belum sepenuhnya terstruktur secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan peningkatan literasi digital melalui tata kelola kolaboratif tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas interaksi, konsistensi komunikasi, serta keberlanjutan hubungan antara pemerintah dan komunitas.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Praktis

Pertama, Diskominfo perlu memperkuat mekanisme koordinasi dengan KIM melalui penyusunan sistem komunikasi yang lebih terstruktur tanpa menghilangkan fleksibilitas yang telah terbentuk. Kebutuhan ini muncul karena pola komunikasi yang ada saat ini cenderung situasional dan belum terstandarisasi secara sistematis. Fleksibilitas yang menjadi keunggulan model interaksi justru memiliki kelemahan berupa tingginya ketergantungan pada kondisi dan inisiatif aktor, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penyampaian informasi. Penguatan struktur komunikasi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada inisiatif individu serta meminimalisasi inkonsistensi tersebut. Di sisi lain, fleksibilitas tetap perlu dipertahankan agar interaksi tetap adaptif terhadap dinamika masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas interaksi.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas KIM secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis maupun penguatan kemampuan analitis dalam literasi digital. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas komunitas masih belum merata, khususnya dalam aspek evaluasi informasi dan produksi konten digital. Model interaksi yang partisipatif memiliki keunggulan dalam mendorong keterlibatan komunitas, namun juga memiliki kelemahan berupa ketimpangan kapasitas antaranggota yang dapat memengaruhi kualitas penyebaran informasi. Penguatan kapasitas tidak hanya berfokus pada kemampuan penggunaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis dan komunikasi digital. Hal ini penting untuk

mendorong komunitas agar tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga agen literasi yang aktif. Dengan demikian, peningkatan kapasitas akan berdampak langsung pada kualitas interaksi dan efektivitas program.

Ketiga, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Selama ini, penggunaan media digital masih bersifat fragmentaris dan belum dikelola dalam satu sistem yang terkoordinasi. Model komunikasi berbasis digital memiliki keunggulan dalam mempercepat arus informasi, namun juga memiliki kelemahan berupa ketergantungan pada komunikasi informal yang tidak terstruktur dan berpotensi menimbulkan distorsi informasi. Integrasi platform digital diperlukan untuk meningkatkan konsistensi pesan serta memperkuat jangkauan komunikasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat dipahami secara optimal. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat distribusi, tetapi juga sarana peningkatan kualitas literasi.

Keempat, diperlukan upaya untuk menjaga kontinuitas interaksi antara pemerintah dan komunitas secara lebih sistematis dan tidak bergantung pada momentum kegiatan. Temuan menunjukkan bahwa interaksi masih bersifat fluktuatif dan meningkat hanya ketika program berlangsung. Model interaksi yang berbasis momentum memiliki keunggulan dalam meningkatkan intensitas partisipasi pada waktu tertentu, namun juga memiliki kelemahan berupa rendahnya keberlanjutan hubungan antaraktor. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya institusionalisasi interaksi dalam sistem sosial. Oleh karena itu, perlu dibangun

mekanisme interaksi yang berkelanjutan melalui agenda komunikasi yang terjadwal. Dengan demikian, hubungan sosial dapat terjaga dan tidak terputus secara periodik.

Kelima, perlu adanya sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dalam setiap bentuk komunikasi dan kegiatan literasi digital. Dominasi komunikasi informal saat ini menyebabkan banyak proses tidak terdokumentasi dengan baik. Model interaksi yang fleksibel dan informal memiliki keunggulan dalam menciptakan kedekatan sosial, namun juga memiliki kelemahan dalam aspek akuntabilitas dan pelacakan informasi. Hal ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas serta sulitnya melakukan evaluasi program secara komprehensif. Sistem dokumentasi yang baik akan membantu dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan dan praktik yang telah dilakukan. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan sistem organisasi.

6.2.2. Saran Akademik

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya mengkaji literasi digital dari perspektif interaksi sosial, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan tata kelola kolaboratif secara lebih operasional dan mendalam. Hal ini penting karena temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara interaksi dua arah yang terjadi dengan prinsip kolaborasi yang ideal. Model interaksi yang adaptif memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, namun juga memiliki kelemahan berupa belum terbangunnya struktur kolaborasi yang stabil dan terinstitusionalisasi. Pendekatan kolaboratif perlu diuji tidak hanya pada aspek komunikasi, tetapi juga pada distribusi kekuasaan, proses deliberasi, dan

pembentukan konsensus. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih kritis mengenai kualitas kolaborasi yang terjadi. Integrasi perspektif ini akan memperkuat kontribusi teoritis dalam kajian administrasi publik.

Kedua, penelitian mendatang perlu memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan variasi komunitas dan wilayah yang memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa pola interaksi dan tingkat literasi digital sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kapasitas komunitas. Model interaksi yang kontekstual memiliki keunggulan dalam penyesuaian lokal, namun juga memiliki kelemahan dalam keterbatasan generalisasi hasil penelitian. Perluasan objek penelitian akan memungkinkan identifikasi pola yang lebih komparatif dan tidak bersifat kontekstual semata. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih kuat. Selain itu, variasi konteks juga dapat mengungkap faktor-faktor determinan yang selama ini belum teridentifikasi secara mendalam.

Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods untuk mengatasi keterbatasan analisis kualitatif yang belum mampu mengukur tingkat literasi digital secara kuantitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan literasi digital, namun belum dapat diukur secara terstandarisasi. Model analisis yang berfokus pada interaksi memiliki keunggulan dalam kedalaman pemahaman, tetapi juga memiliki kelemahan dalam pengukuran yang objektif dan terukur. Integrasi data kuantitatif akan memungkinkan pengukuran yang lebih objektif terhadap tingkat literasi, intensitas interaksi, dan efektivitas program. Pendekatan ini juga dapat memperkuat validitas temuan

melalui triangulasi data. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki daya jelajah yang lebih luas.

Keempat, diperlukan kajian lanjutan yang secara khusus mengkaji peran teknologi digital dalam membentuk pola interaksi sosial, tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi sebagai struktur yang memengaruhi dinamika hubungan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi meningkatkan kecepatan interaksi, tetapi sekaligus melemahkan struktur komunikasi. Model interaksi berbasis teknologi memiliki keunggulan dalam efisiensi, namun juga memiliki kelemahan dalam potensi disorganisasi komunikasi dan ketergantungan pada media digital. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi peran teknologi yang belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi bagaimana teknologi membentuk pola kekuasaan, partisipasi, dan distribusi informasi. Dengan demikian, kajian literasi digital dapat berkembang ke arah yang lebih kritis dan struktural.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang literasi digital terhadap perubahan perilaku masyarakat secara lebih mendalam dan longitudinal. Temuan penelitian ini masih terbatas pada proses dan belum mampu menangkap dampak berkelanjutan. Model interaksi yang berorientasi pada proses memiliki keunggulan dalam dinamika implementasi, namun juga memiliki kelemahan dalam mengukur dampak jangka panjang secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks dan Monograf

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bawden, D. (2008). *Origins and concepts of digital literacy*. In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), *Digital literacies: Concepts, policies and practices* (pp. 17–32). Peter Lang Publishing.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (4th ed.). Routledge.
- Edwards, M. (2014). *Civil society* (3rd ed.). Polity Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. John Wiley & Sons.
- Kooiman, J. (2019). *Governing as governance*. SAGE Publications.
- Kvale, S. (2007). *Doing interviews*. SAGE Publications.
- Lewis, D. (2014). *Non-governmental organizations, management and development* (3rd ed.). Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2021). *Sociological theory* (11th ed.). SAGE Publications.
- Spradley, J. P. (2006). *The ethnographic interview*. Waveland Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Toepler, S., & Anheier, H. K. (2019). *The nonprofit sector in the twenty-first century*. Stanford University Press.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Brinkerhoff, J. M. (2002). Assessing and improving partnership relationships and outcomes: A proposed framework. *Evaluation and Program Planning*, 25(3), 215–231.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Livingstone, S., & Helsper, E. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. *New Media & Society*, 9(4), 671–696.
- Pangestu, M. A. A., & Christin, M. (2022). Analisis strategi komunikasi Program Indonesia Makin Cakap Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan literasi digital. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3272–3280.
- Pratama, B. I., dkk. (2024). Kemitraan dalam pengembangan komunikasi publik Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Malang. *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1–9.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Sari, P., Prasetyo, A., & Widodo, S. (2021). Literasi digital masyarakat Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Komunikasi Digital*, 5(2), 110–125.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Dokumen Pemerintah dan Publikasi Resmi

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2021). *Laporan survei internet APJII 2021*. APJII.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Laporan survei internet APJII 2023*. APJII.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. (2022). *Laporan program literasi digital Kota Malang*. Pemerintah Kota Malang.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. (2023). *Evaluasi program kemitraan KIM*. Pemerintah Kota Malang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. (2024). *Dokumen kinerja tahunan*. Pemerintah Kota Malang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat*. Kominfo RI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Roadmap literasi digital Indonesia*. Kominfo RI.

Pemerintah Kota Malang. (2025). *Program literasi digital Kota Malang tahun 2025*. Pemerintah Kota Malang.

Prosiding

Pitrianti, S., Sampetoding, E. A. M., Purba, A. A., & Pongtambing, Y. S. (2023). Literasi digital pada masyarakat desa. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI) 2023*, 43–46.

Organisasi Internasional

UNESCO. (2021). *Digital literacy for inclusive societies*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2022). *Global media and information literacy assessment framework*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2023). *Media and information literacy framework*. UNESCO Publishing.

Laporan Penelitian dan Working Papers

Kaspersky Lab. (2024). *Cybersecurity Threat Report 2024*. Kaspersky Global Research.